

Strategi Politik dalam Penataan Lembaga Petani di Desa Rambah Muda, Riau

Khairul Anwar*¹, Meyzi Heriyanto¹, dan Dahlan Tampubolon²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Abstrak Penelitian ini bertujuan menemukan strategi penataan lembaga petani konteks percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengambil contoh Sistem Integrasi Sapi-Kelapa (SISKA) di Desa Rambah Muda, Riau. Lebih spesifik riset ini bertujuan untuk mengetahui strategi terobosan penataan bagi peningkatan pendapatan petani swadaya kelapa sawit. Sebagian besar data artikel ini diambil dari Penelitian Strategis Nasional 2017. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi: pelaku terkait SISKA di Desa Rambah Muda; Tujuan dan kepentingan aktor; Dasar sosial dan kelembagaan petani, dan; Jaringan sosio-ekonomi petani pola swadaya. Target khusus hasil penelitian tahun pertama ini adalah strategi penataan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengaturan petani di era reformasi dimulai dari clustering kepentingan petani. Dinamika penataan hubungan kelompok antara ketua dan anggota dengan petani di luar kelompok menjadi basis penguatan ideologi kemandirian lokal di masa depan. Strategi penataan lembaga yang berfokus pada akses kuasa petani dalam proses pengambilan keputusan desa, inilah mendorong kerja organisasi petani yang lebih terintegrasi.

Kata Kunci: strategi politik; penataan lembaga; petani kelapa sawit; reformasi

Abstract This research is aimed to find the strategy of farmer institution arrangement in the context of acceleration of sustainable economic development by taking the example of coconut-cow integration system (known as SISKA) in Rambah Muda Village, Riau. Specifically, this research aims to find out breakthrough strategies for improving the income of farmers in oil palm self-help. Lots of this article's data is derived from the national strategic research 2017. The method was used to identify: SISKA-related actors in Rambah Muda Village; the aims and interests of the actor; the social and institutional basis of farmers, and; the socio-economic network of self-help farmers. The special target of this first-year research result is the strategy of structuring the oil palm farmers. The results showed that the strategy of farming in the reform era started with the clustering of farmers' interests. The dynamics of the arrangement of inter-group relationships between members and members with out-group farmers is a basis for strengthening the ideology of local self-reliance in the future. An institutional arrangement strategy that focuses on farmers' access to the decision-making process encourages the work of more integrated farmer organizations.

Keywords: political strategy; arrangement of institutions; oil palm; reform

JEL Classification: D72

PENDAHULUAN

Dewasa ini peran negara dalam pembangunan ekonomi termasuk ekonomi lokal mengalami pergeseran posisi. Riset Yanuardy (2014) menyatakan bahwa kejatuhan Orde Baru menandai suatu pergeseran dari model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh negara (*state-led developmentalism*) dan masuk ke dalam model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh pasar (*market-led developmentalism*). Adaptasi negara dalam transisi itu, Pemerintah Nasional mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Daerah kabupaten yang merupakan daerah otonom memiliki hak dan kewajiban dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan karakteristik Daerah. Dalam kondisi seperti ini, Riau menghadapi persoalan besar yaitu soal bagaimana menata lembaga kuasa petani dalam konteks manajemen pembangunan lokal. Beberapa riset Syahza dan Indrawati (2010), Anwar (2013), dan Isril (2015) menunjukkan bahwa friksi dan pergulatan kepentingan antara petani, pelaku bisnis dan pemerintah (lokal) era pasca orde baru (ORBA) spektrumnya semakin meluas dan dampaknya melemahkan ekonomi masyarakat terutama petani swadaya. Sementara itu, muncul kebijakan Pemerintah untuk memenuhi 90% pangan asal ternak dan program replanting perkebunan. Berbagai program ini tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat lokal terutama petani swadaya di Riau.

Persoalan arah interaksi petani ini memunculkan pertanyaan ekonomi-politik yang menarik untuk diamati lebih dalam. Riset ini tertarik untuk mempelajari strategi penataan lembaga petani konteks percepatan pembangunan ekonomi di Riau dengan mengambil contoh kasus Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Desa ini dipilih karena karakteristik wilayah dan kondisi sosial-ekonomi petani yang dinamis. Dengan tuntunan literatur ekonomi-politik Frieden (2000) peneliti berusaha mengidentifikasi tujuan program pembangunan Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA), kepentingan aktor, preferensi, dan interaksi aktor dengan lembaga informal lainnya. Selama ini sepengetahuan peneliti belum ada penelitian politik yang menggunakan isu kebijakan SISKA sebagai pintu masuk dalam mendapatkan informasi ilmiah terkait penataan arah tingkah laku petani paling tidak konteks Riau. Penulis berharap agar hasil penelitian ini akan mempunyai arti dalam mengisi kekosongan kajian politik lokal dalam konteks percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025. Untuk lebih memudahkan memahami fenomena strategi politik penataan petani, terlebih dahulu diketengahkan konseptualisasi fenomena ini dengan mengetahui beberapa studi dan literature primer dibawah ini.

Syahyuti (2012) relevan untuk dibicarakan demi mempertajam kerangka analisis yang diajukan peneliti terdahulu. Studi ini, pada dasarnya bertumpu pada pertanyaan pokok penelitian adalah bagaimana petani mengorganisasikan dirinya dalam menjalankan usaha pertaniannya? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut Syahyuti (2012) melakukan reconseptualisasi terlebih dahulu terkait konsep Kelembagaan, Lembaga, dan Organisasi. Menurut Syahyuti selama ini sering terjadi kekeliruan, yaitu menyamakan ketiga konsep tersebut.

Menurut Syahyuti (2012) sebelum dikenal organisasi formal, petani (pekebun) telah mengorganisasikan dirinya (*self organizing*) sedemikian rupa dengan basis pada relasi patron-klien, sentimen kekerabatan, basis sentimen teritorial, ataupun pengorganisasian berbasis personal. Lebih jauh Syahyuti menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha pertaniannya petani menghadapi kerangka kelembagaan (*institutional framework*) yang memberi batasan sekaligus pedoman baik dalam posisinya sebagai individu maupun dalam bentuk organisasi. Kerangka utama yang dihadapi petani tersebut adalah regulasi pemerintah dan norma ekonomi dari pasar.

Tabel 1. Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi

Terminologi dalam literatur berbahasa Inggris	Sering diterjemahkan dalam literatur berbahasa Indonesia selama ini menjadi	Terminologi Semestinya	Batasan dan materinya
1. Institution	Kelembagaan	Lembaga	Bersisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dll menjadi pedoman dalam berperilaku aktor (individu dan organisasi).
2. Institusional	Kelembagaan, institusi	Kelembagaan	Hal-hal yang berkenaan dengan lembaga.
3. Organization	Organisasi, Lembaga	Organisasi	Adalah Sosial group, aktor sosial, yang sengaja dibentuk punya anggota untuk mencapai tujuan tertentu dimana aturan dinyatakan tegas. Misalnya koperasi, kelompok tani, kantor pemerintah.
4. Organization	Keorganisasian, Kelembagaan	Keorganisasian	Hal-hal yang berkenaan dengan organisasi. Misalnya kepemimpinan, keanggotaan, manajemen keuangan, organisasi kapasitas, organisasi relasi dengan organisasi lain.

Sumber: Syahyuti, 2012: 26

Riset Nono mengenai Dampak Kelembagaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Kupang layak di ketengahkan guna mempertajam analisis pengetahuan konsep kelembagaan dalam riset ini. Menurut Nono (2011) mengutip Hayami dan Ruttan bahwa konsepsi dan anatomi kelembagaan di perdesaan, merupakan wujud dari keterkaitan antar empat faktor, yaitu dukungan sumber daya (resource endowments), dukungan budaya (cultural endowments), teknologi (technology), dan kelembagaan (institution). Oleh karena itu sumberdaya alam sumber daya manusia, teknologi dan kelembagaan merupakan empat faktor tersebut saling menunjang. Oleh karena itu, penerapan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan di tingkat usahatani tapi perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya alam, manusia dan kelembagaannya.

Tri Pranadji (2003) membuktikan bahwa kerapuhan kelembagaan memang bisa dipandang sebagai "biang keladi" kegagalan pengembangan perekonomian pedesaan, yang pada gilirannya hal ini tercermin pada perekonomian nasional yang tidak dapat mengelak dari krisis. Lebih jauh Tri Pranadji menjelaskan bahwa paling tidak ada empat aspek kelembagaan yang perlu mereka pahami, yaitu: kepemimpinan, tata nilai, keorganisasian sosial dan tata (otonomi penyelenggaraan) pemerintahan (daerah) yang sehat. Karena kekurangan pemahaman tadi, banyak ditemukan operasionalisasi kebijakan pengembangan kelembagaan pedesaan di lapangan yang bukan saja sulit mencapai hasil yang diharapkan namun juga (justru) menimbulkan perusakan dan gejala kontra produktif terhadap khasanah lembaga setempat yang sudah lama hidup dan berakar pada budaya setempat. Apapun bentuk

dan jenis lembaganya, jika upaya pengembangannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah universal dan diterima masyarakat setempat maka hal tersebut akan menimbulkan kemubaziran.

Nuhung dan Iskandar (2015) mengidentifikasi lima permasalahan dalam pengembangan peternakan sapi, yaitu: Pertama, masih lemahnya dukungan politik dan kebijakan pembangunan industri ternak sapi. Kedua, manajemen pembangunan peternakan sapi cenderung bersifat alamiah, tanpa terobosan baru, terutama dalam rangka meningkatkan populasi yang justru menjadi isu sentral ternak sapi. Ketiga, tingkat validitas dan reliabelitas data lemah. Keempat, pola pengembangan terutama dalam tiga setengah desa terakhir yang mengedepankan pengembangan ternak rakyat dan semakin mengurangi peranan ternak besar. Kelima, sifat dan karakteristik usaha ternak sapi rakyat yang belum komersial.

Kelima permasalahan dalam pengembangan ternak sapi diatas mewarnai struktur industri peternakan semua komoditas ternak domestik dan sebagian besar (60-80 persen) tetap bertahan dalam bentuk usaha rakyat. Yusdja dan Winarso (2009) mencatat ciri-ciri usaha rakyat antara lain tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar luas, skala usaha relative kecil serta pengadaan input utama yakni Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang masih tergantung pada musim, tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan HMT yang terbatas, produksi butir-butiran terbatas dan sebagian tergantung pada impor.

Dari beberapa riset terdahulu terkait kondisi struktur (ekonomi) industri peternakan di Riau, menunjukkan bahwa ciri-ciri usaha ekonomi sangat tergantung pada bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi akan menentukan strategi yang efisien dilaksanakan. Menurut Mubyarto (1995) bentuk ekonomi masyarakat Riau terbagi kepada tiga subsistem, yaitu: subsistem ekonomi modern seperti perkebunan besar, subsistem ekonomi tradisional agraris tradisional seperti perkebunan kecil, dan subsistem ekonomi penduduk asli Riau daratan seperti orang Sakai, Talang Mamak, Suku Laut. Masyarakat dalam sub-sistem ekonomi modern tingkat keberdayaan ekonomi jauh lebih baik daripada kelompok masyarakat dalam sub-sistem ekonomi tradisional. Dalam kondisi seperti itu, di Riau terjadi pertumbuhan yang tidak seimbang antara perkebunan besar kelapa sawit dengan perkebunan kelapa sawit rakyat. Ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau tersebut mengindikasikan akan kebutuhan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran pokok ekonomi rakyat.

Riset yang dilakukan Mahmuddin di Desa Bira dalam memperkuat ekonomi rakyat layak diketengahkan guna mempertajam analisis studi ini. Menurut Mahmuddin (2016) strategi yang mengintegrasikan dakwah dan budaya lokal secara sosiologis adalah langkah-langkah yang sesuai kondisi sosial masyarakat. Strategi ini memperkenalkan niat dan nilai-nilai tulus dalam bekerja, memperkuat etos kerja sebagai ajaran Islam, mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan, menanamkan nilai-nilai amanah dalam bekerja. Selanjutnya Mahmuddin (2016) mengutip San Afri Awang bahwa sasaran pokok ekonomi rakyat dalam garis besarnya meliputi lima hal yaitu: Pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak terlantar. Ketiga, terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif dan merata diantara anggota masyarakat. Keempat, terselenggarakannya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota

masyarakat. Kelima, terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Dalam kaitan dengan strategi revitalisasi peternakan, menurut Daryanto (2017) dapat dilihat dalam dua aras yaitu: a) aras makro yang memfokuskan pada domain aturan main (rules of the games). Aturan main ini pada dasarnya akan mempengaruhi tatanan perilaku dan kinerja dari para pelaku yang terlibat dalam proses transaksi; dan, b) aras mikro yang lebih memfokuskan pada institusional arrangement, sebagai upaya mengatur antar unit sosial-ekonomi mengenai cara-cara bekerjasama dan berkompetisi di antara anggotanya dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Daryanto (2017) menjelaskan bahwa pemahaman akan makna institusi ini menjadi penting artinya karena aktivitas di sektor peternakan baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Hambatan yang sering dijumpai (pemberdayaan) di sektor peternakan adalah upaya untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya. Salah satu kunci sukses keberhasilan program revitalisasi pembangunan peternakan terletak sejauh mana kita akan melakukan penguatan kelembagaan.

Selaras dengan penelitian di atas, Elizabeth (2007) melakukan riset penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani mendukung pengembangan agribisnis kedelai. Menurut Elizabeth lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa, kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (safe), kebutuhan hubungan sosial (social affiliation), pengakuan (esteem), dan pengembangan pengakuan (self actualization). Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat dan sebagai sosial control, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat.

Lebih jauh Elizabeth (2007) menjelaskan bahwa lembaga yang ada sekarang berkembang di pedesaan merupakan lembaga modern, karena umumnya telah memiliki: 1) struktur dan tata nilai yang jelas; 2) telah diformalkan (dengan terdapatnya kepastian anggota dan proses pelaksanaan); 3) adanya aturan tertulis dalam anggaran dasar dan rumah tangga; 4) adanya kepemimpinan yang resmi; dan, 5) biasanya sengaja dibentuk karena tumbuhnya kesadaran pentingnya keberadaan lembaga tersebut.

Selaras dengan penelitian di atas, Eko (2013) meneliti pembangunan dan kesejahteraan di pedesaan. Menurut Eko bahwa inkulifitas daerah banyak ditentukan oleh proses pelebagaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Demikian pula, Tohari (2013) menunjukkan bahwa perangkap demokrasi populer dan liberal memang tidak memikirkan persoalan kesejahteraan. Karena itu kita harus keluar dari perangkap demokrasi minimalis tersebut dan melakukan pemberdayaan, basis empiris masyarakat argraris terletak pada penguasaan tanah dan ternyata konflik penguasaan tanah memiliki kaitan erat dengan kelembagaan demokrasi. Selanjutnya Yatma dan Rama (2017) melakukan riset mengenai manajemen pemerintah daerah dalam gaduhan ternak 2012-2016, Ady merumuskan kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa manajemen pemerintah daerah dalam gaduhan ternak di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan baik karena proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap gaduhan ternak ini masih banyak terdapat permasalahan.

Berbagai studi diatas pada dasarnya memfokuskan diri pada isu pembangunan ekonomi dan kebijakan perkebunan. Penelitian yang diusulkan ini fokusnya pada strategi politik kelembagaan di tingkat lokal yang menggunakan isu kebijakan SSKA yang diterapkan di kebun swadaya sebagai pintu masuk. Studi mengenai kelembagaan petani selama ini jarang mengkaitkannya dengan persoalan lembaga politik lokal. Konseptualisasi yang diajukan para kaum pluralis diatas dapat dikualifikasi oleh teori group politics, dan local politics dan bisa dipakai untuk merumuskan kerangka teoritik kelembagaan petani swadaya pola SSKA di Desa Rambah Muda, Riau

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah: Pertama, melakukan identifikasi berbagai faktor, unsur penentu pembangunan wilayah dan institusi perkebunan di Desa rambah Muda melalui teknik analisis SWOT, strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan therat (ancaman). Kedua, melalui teknik analisis Modern Political Economy melakukan identifikasi: (1) Tujuan dan preferensi aktor terkait implementasi kebijakan SSKA di Desa rambah Muda; (2) Karakteristik sosial- sumber daya kelompok tani; (3) Sarana dan prasarana kelompok tani SSKA; (4) Basis insitusi dan kebijakan terkait program SSKA.

Dipilihnya Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Rambah Muda adalah tempat yang memiliki kelompok tani yang paling dinamik di Rokan Hulu. Kedua, sehingga desa Rambah Muda dapat dijadikan tempat yang efektif untuk melihat implementasi berbagai regulasi yang dibuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terkait peternakan misalnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pola Pengembalian Gaduhan Ternak di Kabupaten Rokan Hulu, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Tahun 2012-2015, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu, Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu Tentang Penunjukan Petugas Pembimbing Bibit Sapi Tahun 2015. Data dikumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap aparaturn Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pihak DPRD, ketua dan anggota kelompok Tani.

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (2000) yaitu: Pertama, mengidentifikasi para aktor konteks implementasi kebijakan pola SSKA di Rambah Muda, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. Aktor-aktor tersebut berasal dari kalangan birokrasi maupun masyarakat petani. Kedua, menggambarkan proses preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit dan SSKA yang diterapkan. Ketiga, mendeskripsikan bagaimana para aktor mengorganisir diri dalam mencapai tujuan produktivitas. Pengorganisasian ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya tawar terhadap kelompok lain dan Pemda dalam rangka implementasi kebijakan pola SSKA. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani terkait program SSKA dalam berinteraksi dengan lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan produktivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Preferensi Para Pihak

Riset penataan kelembagaan petani program SISKKA di desa Rambah Muda dianalisis dengan memakai pendekatan analisa aktor dan jaringannya. Pendekatan ini diperlukan sebagai upaya mengelompokkan para pihak yang bersaing dalam memperjuangkan kepentingannya yaitu, para elit yang bersifat mendukung, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan SISKKA. Pola interaksi para aktor kebijakan tersebut sangat menentukan karakteristik kelembagaan petani yaitu regulasi, organisasi dan sumber daya percepatan pembangunan ekonomi lokal di Desa Rambah Muda dewasa ini. Pertama, kelompok Pemda diwakili Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) misalnya Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Aktor Pemda kabupaten dan Desa ini adalah aktor rasional, aktor yang berupaya memaksimalkan keuntungan dari program SISKKA misalnya tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi juga gagasan mengejar kemakmuran masyarakat petani pasca krisis ekonomi seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan. Menurut Pemerintah Kabupaten bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan potensi daerah yang harus dikelola. Namun potensi perkebunan sawit ini belum sepenuhnya teroptimalkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selama ini produk yang mempunyai nilai hanya pada tandan buah, sementara rumput, pelepah, dan daunnya masih menjadi limbah. Oleh karna itu Pemerintah Kabupaten menerapkan Sistem Integrasi Sapi - Kelapa Sawit untuk mengoptimalkan potensi perkebunan sawit tersebut.

Tabel 2. Aktor, Kepentingan dan Tindakan Sdalam Program SISKKA Desa Rambah Muda, 2017

No	Aktor	Preferensi	Upaya
1	Pemerintah Kabupaten	Kesejahteraan Petani	Peraturan Bupati dan Peraturan Kadis
2	DPRD	Penggunaan Anggaran	Pengawasan Anggaran
3	Kelompok Tani	Tambahan Penghasilan Anggota	Pemberdayaan
4	Petani	Bibit Sapi, Tambahan penghasilan, pakan, Pemasaran dan penyuluhan	Merawat Ternak

Sumber: Data Riset, 2017

Menurut informan kembali bahwa Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit merupakan perpaduan antara manajemen perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi. Perkebunan kelapa sawit dikelola agar hasil samping tanaman terutama pelepah dapat tersedia sepanjang hari untuk pakan sapi yang dimanfaatkan sebagai pengendali rumput/gulma sekitar perkebunan sawit, pengangkut buah sawit dan penghasil kotoran sebagai pupuk organik dan biogas. Bagi Pemerintah Kabupaten, program SISKKA merupakan salah satu usaha program percepatan swasembada daging sapi selain sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha untuk mensejahterakan masyarakat merupakan fokus utama pemerintah yang memanfaatkan potensi lokal.

Kedua, kelompok menerima dengan syarat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu. DPRD sebenarnya mempunyai kekuasaan politik yang sangat besar sebagai representasi dari seluruh rakyat yang dipilih melalui Pemilu legislatif (Pileg). Kedaulatan masyarakat lokal menguat setelah diterapkannya desentralisasi bagi aktor yang menerima dengan syarat kebijakan integrasi sapi-sawit berpendapat bahwa dalam menerapkan program ini diperlukan pengawasan dilakukan oleh DPRD. Menurut informan ini bahwa DPRD melakukan pengawasan pada tahap penganggaran dan distribusi sapi, sementara untuk redistribusi yang dilakukan oleh pemerintah bukan lagi menjadi domain kami. Oleh karena gaduhan ternak ini sifatnya berkelanjutan ataupun bersifat estafet, sebaiknya Dinas Perikanan dan Peternakan menambah tim pengawas lapangan untuk mengawasi ternak pada level paling bawah agar nantinya sapi-sapi yang didistribusikan tidak disalahgunakan. Ketiga, kelompok yang kontra diwakili tokoh-tokoh lokal. Setelah reformasi para elit lokal ini semakin kritis, terbuka dan tegas dalam menyuarakan tuntutan mereka ke publik. Para tokoh sebelum reformasi tidak mampu menyampaikan aspirasinya. Setelah reformasi para elit ini menjadi terbuka dan lantang menyampaikan tuntutan mereka. Kepentingan langsung para tokoh lokal ini sesungguhnya tidaklah jelas seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan. Sementara kepentingan tidak langsung hanyalah bersifat normatif, yakni membentuk opini publik mengenai hak-hak masyarakat lokal yang dimiliki secara turun temurun. Kendatipun demikian, kelompok yang menolak kebijakan integrasi sapi-sawit memiliki komitmen yang sangat tinggi kepada daerah misalnya memperjuangkan agar hak-hak ulayat masyarakat lokal tidak dilanggar dalam membuka perkebunan.

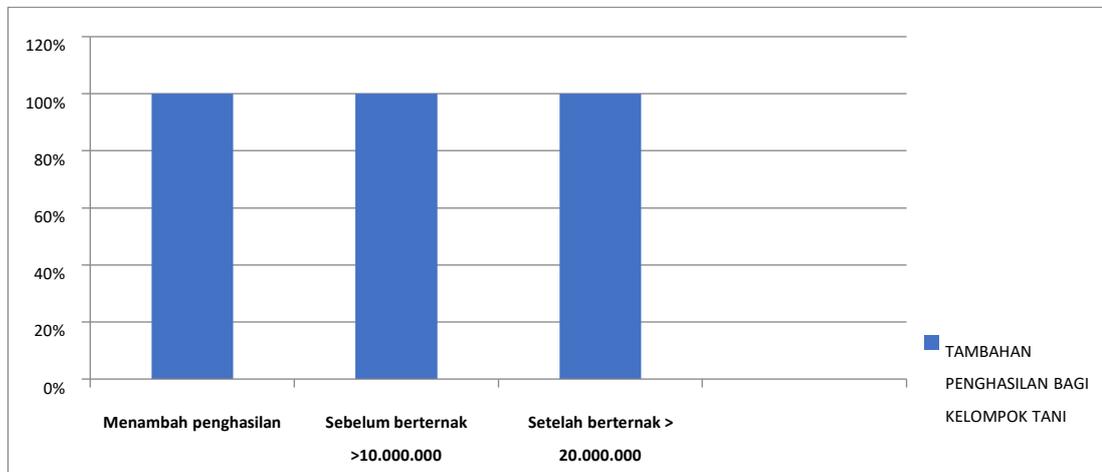
Jumlah aktor yang menanamkan pengaruh dalam proses kebijakan Siska-Kelapa Sawit di Rambah Muda sangat beragam basis institusional, kepentingan dan sumber daya politik yang dimiliki pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok aktor berupaya agar tujuan dan preferensi politiknya tercapai. Karena itu persaingan antar aktor tidak hanya terjadi antar kelompok misalnya kelompok yang mendukung dengan menolak tetapi terjadi juga dalam kelompok yang sama-sama mendukung atau menolak kebijakan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, tokoh ini mengikuti secara seksama setiap isu pembangunan perkebunan sejak awal di buka hingga dewasa ini.

2. Beberapa Tindakan Aktor

Dalam penerapan program Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit pada petani pola swadaya, para aktor lokal memiliki sejumlah pertimbangan ekonomi dan politik. Menurut informan, bahwa para birokrat di lingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini bersifat mendua terutama sesudah diterapkannya kebijakan desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah. Secara institusional pada masa ORBA, lebih banyak mengejar devisa dan produktivitas ternak. Pada era reformasi bergeser selain devisa dan produktivitas juga berupaya mengejar bagaimana program Siska dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani-peternak pola swadaya. Menurut informan birokrat bahwa program Siska merupakan salah satu usaha program percepatan swasembada daging sapi selain sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha untuk mensejahterakan masyarakat merupakan fokus utama pemerintah yang memanfaatkan potensi lokal dan menata kelembagaan dan melakukan pemberdayaan petani terutama pola swadaya.

Selain itu, para petani swadaya memiliki kepentingan "pasar-input" dan "pasar konsumsi", sedangkan "pasar output" sudah sedemikian terbuka. Pasar Input petani

adalah bibit sapi dan lahan perkebunan. Karena melalui bibit ternak dan (luas) lahan akan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani baik yang tergabung atau tidak tergabung dalam kelompok tani. Menurut para petani bahwa program SISKa sudah meningkatkan pendapatan keluarga petani meskipun pada batas-batas tertentu terbatas. Sebagai gambaran kontribusi integrasi sapi-kelapa sawit kepada pendapatan rata-rata rumah tangga petani adalah sebesar Rp.20.000.000/tahun. Sebelum menerapkan program ini hanya rata-rata Rp.10.000.000/tahun. Kontribusi besaran pendapatan ini tentunya ditentukan oleh jumlah ternak sapi dan harga yang berlaku.

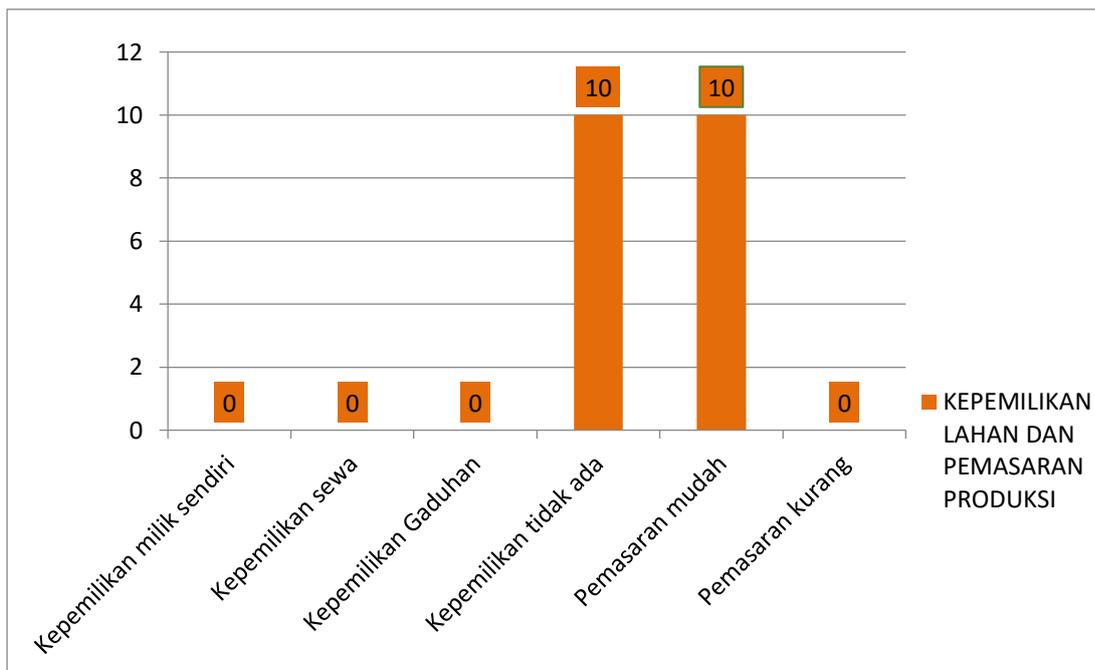


Sumber: Data Riset 2017

Gambar 1. Grafik Tambahan Penghasilan Bagi Kelompok Tani

Menurut informan, sebelum berusaha ternak yang diintegrasikan dengan kelapa sawit pendapatnya hanya bergantung pada hasil produksi perkebunan kelapa sawit. Para petani pola swadaya rata-rata memiliki luas kebun kepala sawit sekitar 2-3 hektar/KK yang terluas 8 hektar dengan pendapatan Rp.2.000.000/bulan. Dalam kondisi perekonomian keluarga seperti ini, tertutup kemungkinan bagi para petani untuk menabung. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak misalnya keperluan anak sekolah, kebutuhan berobat biasanya para petani berhutang kepada para "orang berpunya". Namun dengan usaha program SISKa para petani dapat memenuhi kebutuhan mendesak dengan cara menjual ternak atau menabung hasil penjualan ternak sapi sedemikian rupa terutama pada waktu hari-hari besar hari raya. Kemudian, responden dari kelompok tani menyatakan bahwa berternak sapi ternyata dapat membuka kesempatan kerja, 90 % responden menyatakan kurang dari 5 orang/ha dapat menampung tenaga kerja.

Dengan penjelasan diatas, Informan juga ingin mengatakan bahwa dari data diatas jelaslah mengapa Pemerintah Daerah di Rokan Hulu khususnya dalam era desentralisasi dan OTDA ini memiliki komitmen untuk mengembangkan program integrasi sapi-kelapa sawit dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk menegaskan hal itu misalnya informan di Desa Rambah Muda, Rokan Hulu memberi contoh alokasi anggaran untuk program "gaduhan ternak" melalui dana APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012-2015. Namun pernyataan informan ini berbeda dengan riset yang dilakukan Yatma dan Rama (2017) yang menyimpulkan bahwa dalam implementasinya program ternak gaduhan mendapat berbagai permasalahan.



Sumber: Data Riset 2017

Gambar 2. Grafik Kepemilikan Lahan dan Pemasaran Produksi

Menurut informan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap memiliki komitmen dalam mensejahterakan para petani, meskipun pada batas-batas tertentu terdapat permasalahan. Pengelolaan program “gaduhan ternak” di Dearah ini merupakan kewenangan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Kebijakan ini adalah wujud bagaimana kewajiban Pemda mensejahterakan masyarakat sesuai dengan karakteristik potensi daerah. Pemerintah Kabupaten memformulasikan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pola Pengembalian Gaduhan Ternak. Sebagai leading sector-nya adalah Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam penerapannya, Dinas Perikanan dan Peternakan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts 524.1/ Diskannak/ Tahun 2012.

Masih menurut informan, secara ringkas proses kebijakan ternak sapi ini dimulai dengan mengidentifikasi kelompok tani yang akan menerima bantuan bibit sapi, jumlah bibit sapi yang akan didistribusikan kedalam program SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai Rencana Strategis Dinas (RENSTRA). Tahapan selanjutnya, diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Derah (BAPPEDA) untuk dibuatkan anggarannya dan disahkan dalam APBD.

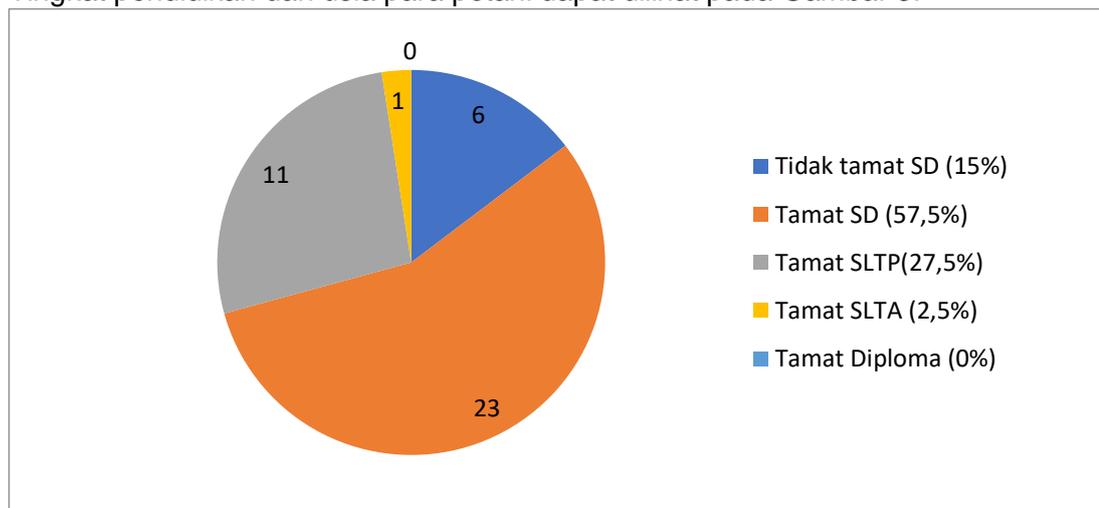
Informan yang lain menyatakan bahwa implementasi program integrasi sapi-kelapa sawit tidak lepas dari kelemahan misalnya dalam mempersiapkan program pembinaan petani swadaya. Pernyataan ini selaras temuan Yatma dan Rama (2017) bahwa Petugas Lapangan Pembina Ternak Bibit Kabupaten Rokan Hulu ini diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 821. 2 / KP / 220/ 03. 2015 sebanyak 26 orang yang tersebar di 16 kecamatan. Hal ini diakui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masih menurut informan bahwa sesungguhnya untuk urusan teknis di dinas kita tidak mempunyai masalah, tetapi untuk petugas lapangan yang mendampingi peternak ini masih kurang. Karena keterbatasan sumberdaya pendamping, dalam 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu ada petugas lapangan mempunyai tugas mengawasi dan

membina lebih dari satu kecamatan yang aksesnya dan jumlah kelompok yang diawasi relatif banyak. Sehingga kinerja PPL tidak terkontrol sedemikian rupa. Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa aspek konten kebijakan dan konteks kebijakan saling terkait bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan pembangunan termasuk integrasi ternak dan tanaman di desa Rambah Muda.

3. Modal Sosial Petani

Sejak kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah diterapkan, perpolitikan lokal di Rambah Muda ditandai berbagai fenomena misalnya pluralitas basis sosial, sumberdaya, dan arena kebijakan. Kondisi ini mewarnai karakteristik para aktor kebijakan lokal dalam proses kebijakan ekonomi dan pertanian. Para petani memiliki kepentingan yang beragam, latar pendidikan yang bermacam-macam. Sebelum reformasi, keragaman latar sosial ini terpendam. Sesudah reformasi, kondisi ini diungkapkan petani semakin terbuka dan dinamik. Sehingga pemerintah (Daerah) harus tanggap untuk dipertimbangkan dalam proses kebijakan. Potensi keragaman basis sosial ini jika tidak diorganisasikan dalam batas-batas tertentu dapat menjadi sumber ketegangan sosial. Oleh karena itu, upaya mendemokratisasikan politik lokal menjadi keharusan bersama dalam kebijakan integrasi sapi-kelapa sawit di Rokan Hulu.

Para petani adalah pihak yang rasional, aktor ini berupaya memaksimalkan kepentingannya dalam berternak sapi. Dalam rangka mencapai tujuannya tersebut, para petani ini bersaing menanamkan pengaruhnya dalam proses kebijakan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Keberhasilan dalam mencapai tujuannya tersebut ditentukan antara lain oleh sumber daya yang dimilikinya misalnya tingkat pendidikan, pengalaman dalam bertani, lahan, sarana produksi, konsumsi keluarga dan pemasaran. Kondisi primer ini berdampak kepada tinggi rendahnya kesadaran petani dalam mendukung kebijakan sistem integrasi sapi-kelapa sawit. Tingkat pendidikan dan usia para petani dapat dilihat pada Gambar 3.

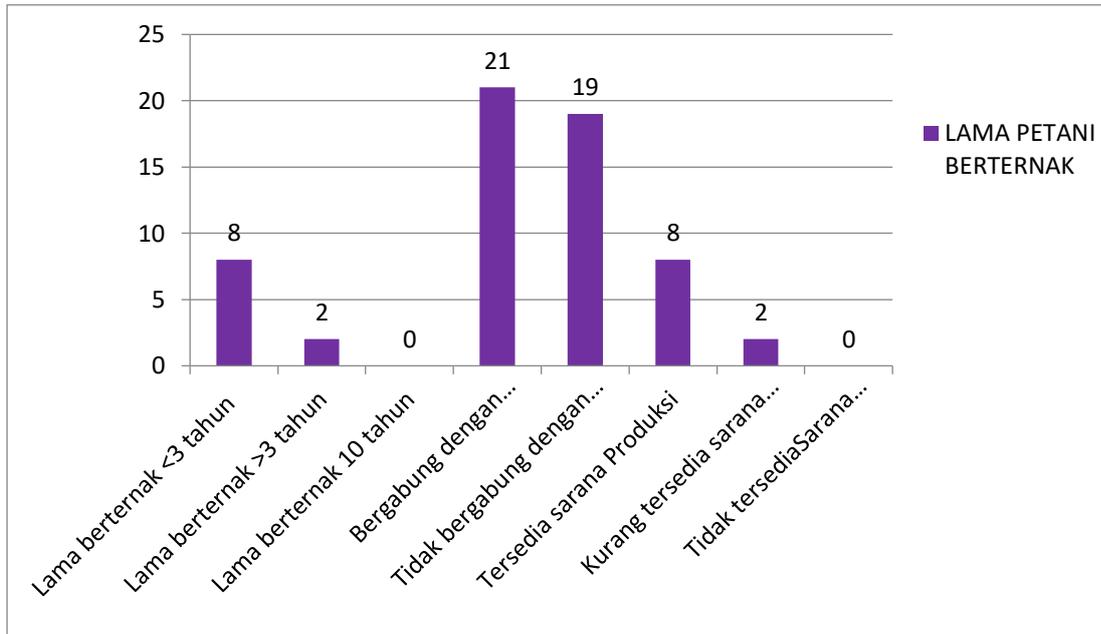


Sumber: Data Riset 2017

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Petani Sawit Rakyat

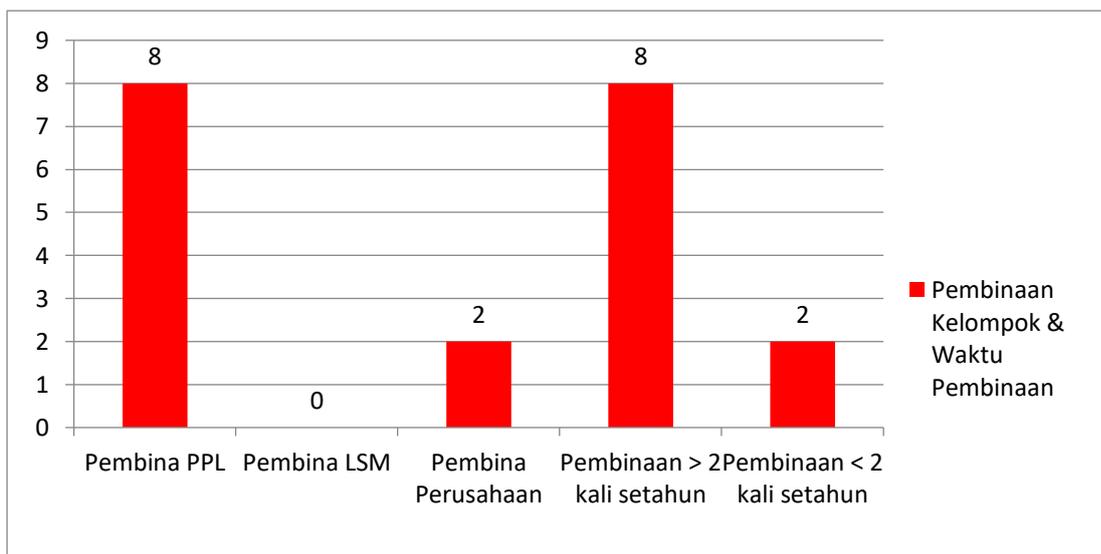
Dari data tabel diatas nampak bahwa rata-rata tingkat pendidikan petani yang terkait program integrasi sapi-kelapa sawit di Desa Rambah Muda tamat SD (%) dan dalam usia produktif rata-rata 15-55 tahun. Kondisi sosial ini memang bersifat relatif dalam mempengaruhi perilaku petani. Namun apabila dilihat dari lama waktu berusaha ternak, para petani umum relatif baru yaitu <3 tahun. Hal inilah yang

menjelaskan mengapa para petani secara struktural bersikap kurang berpartisipasi penuh dalam program integrasi sapi-kelapa sawit yang diterapkan pemerintah, meskipun para petani mengakui manfaatnya.



Sumber: Data Riset, 2017

Gambar 4. Grafik Lama Petani Beternak Sapi



Sumber: Data Riset, 2017

Gambar 5. Grafik Bentuk dan Waktu Pembinaan Kelompok Tani

Pertanyaan selanjutnya mengapa para petani dalam batas-batas tertentu masih tetap bertahan bersikap mendukung program integrasi sapi-kelapa sawit, meskipun tingkat pendidikan dan keterampilan serta pengalaman tergabung dalam kelompok tani terbatas. Fakta ini terjadi karena informan menilai sarana produksi misalnya bibit, pakan ternak dan lahan perkebunan masih tersedia. Selain itu, jumlah anggota keluarga yang ditanggung petani ternyata menjadi alasan rasional seperti yang dijawab responden dalam wawancara. Menurut informan (baik yang tergabung dalam kelompok tani atau tidak bergabung) bahwa dalam memenuhi

kebutuhan keluarga yang mendesak, para petani sering kali bergantung dengan produksi ternak yang ada. Hal ini dimungkinkan karena dukungan akses pemasaran yang terbuka.

Secara kelembagaan, sepanjang yang dapat diamati bahwa analisis dukungan terhadap kebijakan integrasi sapi-kelapa sawit diatas akan dapat bertahan apabila kondisi sosial petani tersebut diimbangi oleh adanya intervensi pemerintah (daerah) dalam bentuk pembinaan secara terlembaga artinya ada dukungan regulasi (tidak hanya yang mengatur anggaran), pembagian kerja dan koordinasi antar lembaga terkait dan fokus kegiatan kepada pemberdayaan petani dalam konteks program. Hingga tahun 2017, program pembinaan relatif sudah berjalan tetapi hanya dilakukan oleh PPL dengan frekuensi 2 kali setahun melalui pendekatan kelompok tani. Berdasarkan data dari kelompok tani mengenai pelaksanaan program pembinaan oleh PPL pertanian dapat dilihat pada Gambar 5.

4. Strategi Penataan

Strategi penataan petani era kebijakan desentralisasi berbeda dengan sebelum diterapkan Otonomi Daerah. Jika sebelum kebijakan desentralisasi diimplementasi, penataan kelembagaan petani bersifat *top-down* dan terfokus pada lembaga-lembaga petani di desa. Sesudah kebijakan desentralisasi diterapkan, secara normatif penataan kelembagaan petani arahnya kepada kepentingan petani yaitu, bagaimana membangun struktur yang dapat menjamin mengatasi masalah Pasar *Input*, Pasar *Output* dan pasar konsumsi para petani.

Secara empiris, strategi politik mengembalikan kuasa akses pengambilan keputusan kepada petani belum terlaksana secara optimal. Proses penataan kelembagaan petani ini belum menekankan langkah membangun struktur penopang lembaga petani di pedesaan. Petani memiliki keterbatasan kepada akses sedemikian rupa dalam proses kebijakan di tingkat lokal. Strategi politik pembinaan petani ini dapat dimulai dari langkah pertama, Pemerintah Kabupaten melakukan komunikasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses komunikasi ini dimaksudkan untuk memperkuat identifikasi terhadap berbagai kepentingan petani misalnya pupuk, bibit sapi sarana dan prasarana pendukung lainnya. Legitimasi DPRD penting dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi pemberdayaan. Materi yang harus diketahui oleh para politisi adalah isu-isu strategis baik yang berdampak lokal, nasional, dan global. Isu-isu ini diperbincangkan dan diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat. Pemetaan terhadap isu-isu strategis menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebijakan.

Langkah kedua, sosialisasi bagi pelaku Bisnis (perusahaan). Tujuannya adalah agar para petani mendapatkan akses/jaringan pemasaran lebih luas dalam berusaha. Pada umumnya, program-program pemberdayaan perusahaan perkebunan lebih duluan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan ini dimaksudkan untuk memperkuat identifikasi terhadap berbagai kepentingan petani dalam pemberdayaan. Sosialisasi kepada para pelaku bisnis mengacu pada dokumen yang sudah disepakati dan menjadi komitmen bersama yaitu visi dan misi pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD tertuang dalam Kebijakan, program, kegiatan dalam rentang waktu lima tahun. RENSTRA Dinas peternakan. Langkah ketiga, sosialisasi dan diskusi public terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sosialisasi SKPD ini dimaksudkan untuk memperkuat identifikasi terhadap unsur-unsur kepentingan petani meliputi; bibit sapi, pemasaran dan konsumsi petani. Setiap masalah itu diidentifikasi isu kebijakan (hal-hal yang dipandang sebagai kebutuhan petani), masalah kebijakan dan formula kebijakan itu sendiri. Substansi materinya

adalah Pertama; materi yang harus diketahui oleh para satuan kerja adalah isu-isu strategis baik yang berdampak lokal, nasional, dan global. Isu-isu ini diperbincangkan dan diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat. Pemetaan terhadap isu-isu strategis menjadi bahan untuk mengidentifikasi masalah-masalah petani. Adapun cara kerja yang dipakai dalam diskusi adalah tatap muka, wawancara, Focus Group Discussion, diskusi kelompok, dilanjutkan dengan ceramah. Metode yang paling tepat untuk para SKPD adalah metode tukar pengalaman, FGD, seminar dan loka karya. Foto, gambar, animasi, brosur, liflet, materi yang sudah dimasukkan dalam power point, lap-top, LCD dan Listrik, konsultasi publik (ditempat tertutup/terbuka), materi yang telah ditulis sebagai bahan diskusi, dan table matrik berisikan pertanyaan penuntun.

Langkah keempat, sosialisasi dan diskusi kepada para Camat, Kepala Desa dan PPL. Bahan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkuat identifikasi terhadap upaya mengatasi berbagai kepentingan petani yang sudah disepakati dengan DPRD dan SKPD. Struktur pemerintah Desa dan PPL diharapkan dapat mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan petani. Oleh karena itu kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan dan standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan dapat tersosialisasikan dengan baik di tingkat PPL. Secara teknis struktur inilah yang menjadi ujung tombak berbagai kegiatan pemberdayaan bagi petani. PPL diharapkan tidak lagi bekerja sendiri dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada petani. Pada akhirnya para petani benar-benar berdaya dalam membuat keputusan dan mendapatkan akses dalam proses kebijakan di Daerah.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam bagian terdahulu sebagai penuntun, penulis dapat menarik kesimpulan riset ini sebagai berikut: strategi politik penataan lembaga petani tidak dimulai dari lembaganya melainkan dari petani sesuai dengan konteks yang dihadapi. Inilah yang membedakan riset ini dengan penelitian lain terkait kelembagaan petani yang dilakukan penulis. Sepanjang yang dapat diamati dalam garis besarnya bahwa strategi penataan lembaga petani swadaya dilakukan bersifat *top down*, sehingga terdapat kesan seolah-olah penataan ini hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Peternakan. Sementara organisasi pemerintah dan non pemerintah belum terintegrasi sedemikian rupa. Riset ini menemukan bahwa langkah-langkah penataan kelembagaan petani pola swadaya Desa Rambah Mulia dapat dimulai dengan membangun struktur penopang kelembagaan petani yaitu regulasi pemerintah yang dapat mengintegrasikan lembaga-lembaga dan menjamin proses kebijakan dan pendanaan program penataan lembaga petani. Program ini diarahkan kepada tiga hal: aturan main lokal, lembaga-lembaga sosial petani dan peningkatan kapasitas sumber daya petani, ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian rupa secara berkelanjutan. Beberapa langkah inilah diharapkan akan membangun tindakan kolektif para aktor dalam mendesentralisasikan kuasa kepada petani dalam membuka akses ke proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. 2013. *Politik dan Sawit: Sinergitas Formulasi Kebijakan Kelapa Sawit di Riau 2006-2011*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Daryanto, A. 2007. *Peningkatan Daya Saing Industri Perternakan*. Jakarta: PT. Permata wacana Lestari. Trobos.

- Eko, S. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Elizabeth, R. 2007. Penguatan dan pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. *Dalam Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternative Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Frieden, J.A. 2000. *The Method of Analysis: Modern Political Economy*. Dalam *Modern Political Economy Theory and Latin and America Policy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Isril. 2015. Konflik Pertanahan Berbasis Perkebunan di Daerah Aliran Sungai: Kasus DAS Siak, 2004-2014. *Laporan Penelitian*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Mahmuddin. 2016. Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 15(1): 25-27.
- Mubyarto. 1995. *Riau Menatap Masa Depan (hasil penelitian)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Nono, O.H. 2011. Dampak Kelembagaan bagi Hasil Terhadap Kinerja Usaha Penggemukan Hasil Sapi Potong di Kabupaten Kupang. *Jurnal Sosiohumaniora* 13(1): 20-38.
- Nuhung, A., dan Iskandar. 2015. Kinerja, Kendala Dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33(1): 67-69. <https://doi.org/10.21082/fae.v33n1.2015.63-80>
- Pranadji, T. 2003. Penajaman Analisis Kelmbagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian Dan Pedesaan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 21(1).
- Syahyuti. 2012. Pengorganisasian Diri Petani Dalam Menjalankan Agribisnis Di Pedesaan: Studi Lembaga Dan Organisasi Petani Dalam Pengaruh Negara Dan Pasar. *Ringkasan Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia.
- Syahza, A. dan H. Indrawati. 2010. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan. *Jurnal Sosiohumaniora* 12(3): 207-220. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i3.11551>
- Tohari, A. 2013. *Keluar Dari Demokrasi Populer*. Yogyakarta: Polgov-Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Yanuardy, D. 2014. MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara dalam MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis sosial-Ekologis Indonesia: Studi Kritis Master Plan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Yogyakarta: Tab Grafika.
- Yatma A., dan A.S. Rama. 2017. Manajemen Pemerintah Daerah dalam Gaduhan ternak: Studi Gaduhan Sapi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Yusdja, Y., dan B. Winarso. 2009. Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi Menuju Sistem Peternakan yang diharapkan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 7(3): 273.

Peraturan Perundangan:

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pola Pengembalian Gaduhan Ternak di Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Tahun 2012-2015.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kementerian LH, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.